

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR DALAM HAL  
TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA MALANG**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Reza Ediputra

NIM. 105010104111010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Jurnal : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA  
JASA PARKIR DALAM HAL TERJADI  
KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : REZA EDIPUTRA**

**b. NIM : 105010104111010**

**c. Konsentrasi : Hukum Perdata Murni**

**Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan**

Disetujui pada tanggal: Mei 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Suhariningsih, SH. SU

NIP. 19500526 198002 2 001

M.Hamidi Masykur, SH. MKn.

NIP. 19800419 200812 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M  
NIP. 19660622 199002 2 001

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

**Reza Ediputra, Prof. Dr. Suhariningsih, SH. SU., M.Hamidi Masykur, SH. Mkn.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Rezacrozznba@gmail.com](mailto:Rezacrozznba@gmail.com)

### **ABSTRAKSI**

Artikel ilmiah ini berisikan analisis tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Latar belakang dari penulisan ini adalah banyaknya pelajar di Universitas Brawijaya yang berdampak terhadap tempat parkir di setiap Fakultas. Tempat parkir menjadi penuh dan tidak teratur. Dalam hal mengatasi masalah terkait tempat parkir, pihak Universitas Brawijaya Malang telah menempatkan petugas parkir di setiap fakultas untuk menjaga dan mengatur kendaraan bermotor yang diparkir. Namun, para petugas parkir ini dalam menjalankan kewajibannya seringkali lalai dan tidak berhati-hati sehingga timbul berbagai masalah terkait kendaraan bermotor yang diparkirkan, misalnya terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan bermotor ketika sedang diparkirkan. Ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, pengguna jasa parkir masih belum mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi yang layak. Permasalahan yang terjadi adalah ketika pengguna jasa parkir tidak mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dari petugas parkir yang lalai dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pengelola parkir di Universitas Brawijaya Malang. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum oleh pihak-pihak dalam beraktivitas yang dalam hal ini meneliti pengguna jasa parkir kendaraan bermotor di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Adapun kegiatannya adalah untuk mengetahui keadaan nyata pengelolaan parkir di lingkungan Universitas Brawijaya Malang yang didalamnya ditemukan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, khususnya pasal 21 tentang tanggung jawab petugas parkir terhadap pengguna jasa parkir. Tanggung jawab ini diukur tidak dari kesalahan petugas parkir yang bersangkutan saja, melainkan juga dari kurang hati-hatinya pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya Malang, yang secara khusus akan diteliti dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Dari hasil penelitian diatas, penulis memperoleh hasil jawaban yaitu setiap petugas parkir yang lalai wajib bertanggungjawab kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya ketika sedang diparkir, dan pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya sebagai majikan dari petugas parkir yang bersangkutan ikut bertanggung jawab dalam hal ganti rugi. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dikarenakan kurangnya upaya preventif dan represif dari pihak pengelola parkir serta kurangnya pengetahuan pengguna jasa parkir mengenai aturan terkait perparkiran di Universitas Brawijaya.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Parkir**

## ABSTRACT

**REZA EDIPUTRA, Pure Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, March 2014, *Legal Protection Against User Services Parking In cas of loss of Motor Vehicles in Brawijaya University*. Prof. Dr. Suhariningsih. SH., SU.; M.Hamidi Masykur, SH. MKn.**

This scientific article contains an analysis of legal protection for service users in the event of loss of parking a motor vehicle in Brawijaya University. The background of this paper is the number of students at Brawijaya University that affect the aprk in any faculty. Parking lot becomes full an irregular. In terms of addressing problems related to the parking lot, the Brawijaya University has put a parking attendant in each faculty to maintain and regulate motor vehicle is parked. However, the parking attendant is often negligent in carrying out their obligations and are not careful which raised various issues related to motor vehicles parked, for example, an accident or loss of a motor vehicle while it is parked. When there is a loss of the motor vehicle is being parked, the problem taht occurs is when the park services users do not get any form of accountability from the parking attendant negligent and did not get legal protection from the manager of parking at Brawijaya University. The research method used in an empirical legal research, which identifies and analyzes the application of law by the parties to move in this case the user examining motor vehicle parking services at Brawijaya University environment. The activities are to know the real state of parking management in Brawijaya University Malang which also found issues of flegal protection of service users in terms of loss of parking a motor vehicle in Brawijaya University. Research using socio-jurudical approach, the approach that focuses on the application of Malang Regional Regulation No. 4 of 2009 on the Management of parking place, in particular article 21 on the responsibility of the user to the parking attendant parking services. This responsibility is not measured from the parking attendant error is concerned, but also of his less heart-users of parking services at Brawijaya University, which will be specifically examined in the event of loss of the motor vehicle at Brawijaya University. From the above results, the authors obtain results that answer any negligent parking attendant who shall be responsible to service users who have lost their motor vehicle while it is parked and the parking management of Brawijaya University as an employer of a parking attendant in question was partly responsible in terms of compensation. As for the legal protection for users of parking services are still not getting adequate legal protection due to lack of preventive and repressive efforts of the manager of parking and lack of user knowlege about the rules relating to parking services at Brawijaya University.

**Keyword : Legal Protection, Parking**

### **A. Pendahuluan**

Dewasa ini, Kota Malang yang juga dikenal sebagai kota pendidikan mengalami peningkatan jumlah pelajar yang cukup signifikan, terutama pelajar mahasiswa yang menempuh studi di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya dari dalam kota saja, tetapi banyak pelajar dari luar Kota Malang yang ingin menempuh studi di Universitas Brawijaya.

Banyaknya pelajar di Universitas Brawijaya ini, tentu saja berdampak terhadap tempat parkir di setiap fakultas. Tercatat bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2011/2012 berjumlah 12538 mahasiswa, sedangkan pada tahun ajaran 2013/2013 meningkat menjadi 15429 mahasiswa.<sup>1</sup> Adanya peningkatan Mahasiswa baru menyebabkan tempat parkir menjadi penuh dan tidak teratur. Tetapi, dalam hal mengatasi masalah terkait tempat parkir, pihak Universitas Brawijaya Malang telah menempatkan petugas parkir di setiap fakultas untuk menjaga dan mengatur kendaraan bermotor yang diparkir. Namun, para petugas parkir ini dalam menjalankan kewajibannya lalai dan tidak berhati-hati sehingga timbul berbagai masalah terkait kendaraan bermotor yang diparkirkan, misalnya terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan bermotor ketika sedang diparkirkan.

Selain lalai dan tidak berhati-hatinya petugas parkir, dari hasil wawancara penulis dengan seorang petugas satpam Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa terdapat kendala-kendala yang timbul terkait masalah hilangnya kendaraan bermotor di area parkir Universitas Brawijaya, antara lain kurangnya tenaga kerja satpam untuk menjaga pos dan patroli, pintu gerbang Universitas Brawijaya yang bebas keluar-masuk 24jam, serta tidak adanya koordinasi antara petugas parkir dengan satpam sehingga timbul banyak celah dan mengakibatkan kendaraan bermotor yang diparkir hilang.

Dalam hal di atas, penulis mengambil contoh kasus dengan mewawancarai salah satu korban yang kehilangan kendaraan bermotor di area parkir Universitas Brawijaya sebagai berikut.

Amalia Rahma Indriani, seorang mahasiswi FIA Universitas Brawijaya, pergi ke kampus dengan menggunakan sepeda motor untuk mengikuti perkuliahan. Setelah sampai, Amalia memarkir kendaraannya di parkiran KOPMA (Koperasi Mahasiswa), Amalia kemudian berjalan menuju kelas. Ditengah perjalanannya, Amalia sadar jika kunci motornya tidak ada di saku celananya. Kemudian Amalia kembali menyusuri jalan hingga ke tempat parkir motornya, namun Amalia tidak menemukan kunci motornya. Amalia memberitahu petugas parkir bahwa kunci motornya telah hilang dan mengatakan apabila menemukan kunci motor miliknya, Amalia meminta supaya kunci motornya disimpan terlebih dahulu dan Amalia juga menitipkan pada petugas

---

<sup>1</sup> <http://prasetya.ub.ac.id/berita/UB-Terima-15419-Mahasiswa-Baru-Tertinggi-di-Indonesia-11102-id.html>.  
Diakses 2 Maret 2014

parkir tersebut untuk mengawasi sepeda motornya yang bernomor polisi N2107 CJ atas nama Indro Koesusanto. Setelah kuliahnya selesai, Amalia langsung menuju area parkir, namun sesampainya di area parkir, ia mendapati bahwa sepeda motornya tidak ada di tempat dimana ia memarkirkannya. Amalia kemudian protes kepada penjaga parkir yang bersangkutan, tetapi petugas parkir tersebut tidak mau tahu tentang sepeda motor yang hilang. Menanggapi hal tersebut, Amalia kemudian melapor ke Markas Komando Satpam untuk mengurus masalah kehilangan sepeda motornya, namun setelah menunggu sampai sore, tidak ada yang menemukan sepeda motor milik Amalia. Amalia juga mencoba melaporkan kejadian ini ke pembantu Dekan III FIA, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pihak kampus mengatakan tidak bisa mengganti kerugian sepeda motor milik Amalia yang hilang dengan alasan Amalia tidak mempunyai karcis masuk UB. Amalia juga mengatakan bahwa pihak kampus tidak mampu untuk mengganti jika barang yang hilang berupa kendaraan bermotor, pihak Kampus hanya mampu jika kendaraan yang hilang berupa sepeda biasa. Amalia juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lowokwaru, namun sampai sekarang tidak ada kabar lebih lanjut mengenai sepeda motornya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Amalia kemudian hanya pasrah saja menunggu laporan dari pihak yang berwenang.<sup>2</sup>

berdasarkan Surat Edaran Rektor nomor 5798/UN10.16/LL/2010, angka 9.1 tentang kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor menyebutkan bahwa, kehilangan atau kerusakan kendaraan yang disebabkan kelalaian petugas, akan diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila :

1. Ada bukti pembayaran stiker bagi yang berlangganan dan bukti masuk bagi yang tidak berlangganan.
2. Kendaraan diparkir di lokasi parkir yang telah disediakan.
3. Kendaraan hilang pada saat jam parkir dan ada petugas parkir.
4. Kendaraan betul-betul dalam keadaan terkunci dengan menunjukkan bukti kunci, STNK, dan BPKB.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Rektor nomor 5088/UN10/LL/2013, angka 8 tentang kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor menyebutkan bahwa,

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Amalia Rachma Indriani, Mahasiswi FIA UB, pada Tanggal 19 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB di Rumah Korban.

kehilangan atau kerusakan kendaraan yang disebabkan kelalaian petugas, akan diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila :

1. Ada bukti karcis masuk.
2. Kendaraan diparkir dilokasi parkir yang ada petugas parkir.
3. Kendaraan hilang pada saat jam parkir dan ada petugas parkir.
4. Kendaraan betul-betul dalam keadaan terkunci dengan menunjukkan bukti kunci, STNK dan BPKB asli.

Dari perbandingan Surat Edaran Rektor yang lama dengan Surat Edaran Rektor yang baru, dapat diketahui bahwa peraturan tentang penggantian kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan petugas parkir untuk lepas dari tanggung jawab supaya tidak mengganti kerugian apabila terdapat kendaraan bermotor yang hilang di area parkir Universitas Brawijaya.

Didalam pasal 3 huruf (d) Perda Malang nomor 4 tahun 2009 menyebutkan bahwa, pengaturan pengelolaan tempat parkir bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 1999, menyatakan bahwa, penyelenggaraan tempat parkir adalah merupakan kewenangan daerah.<sup>4</sup> Jadi, tiap-tiap daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir dapat membuat aturannya sendiri-sendiri. Sedangkan dalam Perda Malang nomor 4 tahun 2009, menyebutkan bahwa, terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Dari contoh kasus di atas, telah terpenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya

---

<sup>3</sup>Pasal 3 Huruf (d) Perda Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Pengelolaan Tempat Parkir**.

<sup>4</sup>Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 Tahun 1999 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Daerah**.

<sup>5</sup>Pasal 21 Perda Malang nomor 4 tahun 2009 tentang **Pengelolaan Tempat Parkir**.

<sup>6</sup>Pasal 1365 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.

kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Artinya, bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum disini tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemilik yang kehilangan kendaraan bermotornya tersebut dapat menuntut kepada petugas parkir yang bersangkutan, meskipun petugas parkir tersebut tidak mau bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dengan berbagai macam alasan yang tertera di Surat Edaran Rektor nomor 5088/UN10/LL/2013, angka 8.

Sedangkan dalam pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.<sup>7</sup> Ketika seorang petugas parkir dalam menjaga area parkir melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi para pengguna jasa parkir, tidak hanya petugas parkir itu saja yang dapat bertanggungjawab tetapi juga “majikan” dari para petugas parkir ini juga ikut bertanggungjawab mengganti kerugian, yang dalam hal ini adalah pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya Malang.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk dan diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan masalah terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pengguna jasa parkir tersebut serta bentuk tanggungjawab yang dapat dituntut oleh pengguna jasa parkir di dalam area Universitas Brawijaya, dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR  
DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG”**

**B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup>Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



1. Bagaimanakah tanggung jawab petugas parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang diparkir di dalam area Universitas Brawijaya Malang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pengguna jasa parkir dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang?
3. Bagaimanakah upaya Pihak Universitas Brawijaya Malang untuk melindungi pengguna jasa parkir terkait petugas parkir yang tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor yang diparkir?

### C. Pembahasan

#### 1. Tanggung Jawab Petugas Parkir Apabila Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang

Berdasarkan hasil wawancara penulis, jika terdapat kehilangan bermotor di area parkir Universitas Brawijaya, langkah awal pihak pengelola parkir di Universitas Brawijaya adalah melakukan *cross check* terhadap kasus tersebut, apakah benar parkir di area parkir yang telah disediakan, apakah terdapat petugas parkir yang sedang bertugas menjaga area parkir. Apabila hal tersebut memang terbukti benar merupakan kelalaian dari petugas parkir yang bersangkutan, maka petugas tersebut wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum, menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Kesalahan (*liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab yang telah peneliti kemukakan, terkait masalah pertanggungjawaban petugas parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, peneliti sependapat dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muhamad Reza Aditya Warman, Kordinator Petugas Parkir Universitas Brawijaya. Hari Senin, 24 Februari 2014.

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.92

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Didalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan melanggar hukum
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).<sup>11</sup>

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan *liability based on fault*, apabila kendaraan yang sedang diparkir milik pengguna jasa parkir tersebut hilang, dan memenuhi unsur-unsur kesalahan atau kelalaian dari petugas parkir dalam menjaga area parkir, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka petugas yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian meskipun petugas parkir tersebut berdalih untuk tidak mau mengganti kerugian dengan alasan tidak ada karcis tanda masuk atau aturan yang tertera di Surat Edaran Rektor tentang Parkir.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Universitas Brawijaya Malang**

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para korban kehilangan kendaraan bermotor, tidak ada satupun yang mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi dikarenakan tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang tertera pada Surat Edaran Rektor tentang Parkir yang berlaku.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal.73-79

<sup>11</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit. Hal.93

<sup>12</sup> Wawancara dengan Amalia Rachma Indriani, Mahasiswi FIA UB, pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB di rumah Amalia.

**a. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir di Universitas Brawijaya Untuk Mencegah Kerugian Akibat Kehilangan Sepeda Motor**

Berdasarkan teori perlindungan preventif milik Hadjon, penulis menganalisis bahwa terdapat 3 upaya preventif terhadap pengguna jasa parkir untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan dari kehilangan sepeda motor.

- 1) Pembaruan Karcis Tanda Masuk
- 2) Menambah SDM Petugas parkir
- 3) Pemusatan Lokasi Parkir UB

**b. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir di Universitas Brawijaya yang Sudah Dirugikan Akibat Kehilangan Sepeda Motor**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, jika terdapat kehilangan bermotor di area parkir Universitas Brawijaya, langkah awal pihak pengelola parkir di Universitas Brawijaya adalah melakukan *cross check* terhadap kasus tersebut, apakah benar parkir di area parkir yang telah disediakan, apakah terdapat petugas parkir yang sedang bertugas menjaga area parkir. Apabila hal tersebut memang terbukti benar merupakan kelalaian dari petugas parkir yang bersangkutan, maka pihak yang kehilangan dapat meminta ganti rugi kepada petugas yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Namun dalam prakteknya, petugas parkir yang bersangkutan tidak mau mengganti kerugian dengan dalih tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Rektor tentang parkir.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis, penitipan barang yang ada pada area parkir tergantung kebijakan dari tiap-tiap Fakultas itu sendiri. Apabila di Fakultas tersebut memiliki banyak mahasiswa, misalnya saja Fakultas Ekonomi, maka akan disediakan tepat penitipan barang seperti penitipan helm.<sup>15</sup>

Universitas Brawijaya dalam Surat Edaran Rektor tentang Parkir, baik yang lama maupun yang baru tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk sebenarnya

Wawancara dengan Mohammad Charis Ismail, Mahasiswa FH UB, pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 14.00 di lantai 3 gedung B FH UB

Wawancara dengan Zeta Alvema Novita Sari, Mahasiswi FIA UB, pada tanggal 20 November 2013 pukul 14.00 WIB di Kantin FIA UB

Wawancara dengan Ersya Ratna Sari, Mahasiswi FEB UB, pada tanggal 20 November 2013 pukul 13.00 WIB di Kantin FEB UB

<sup>13</sup> Wawancara dengan Muhamad Reza Aditya Warman, Kordinator Petugas Parkir Universitas Brawijaya. Hari Senin, 24 Februari 2014.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Amalia Rachma Indriani, Mahasiswi FIA UB, pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB di rumah Amalia.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muhamad Reza Aditya Warman, Kordinator Petugas Parkir Universitas Brawijaya. Hari Senin, 24 Februari 2014.

dari perparkiran di Universitas itu sendiri. Padahal, dapat dilihat bahwa sebenarnya bentuk perparkiran di Universitas Brawijaya merupakan penitipan barang.

Menurut Faure, dalam prakteknya terdapat patokan untuk perjanjian penitipan barang (kendaraan bermotor), antara lain :<sup>16</sup>

- 1) Apakah terdapat petunjuk-petunjuk khusus bagaimana kendaraan bermotor harus diparkirkan? Semakin banyak dan ketat petunjuk yang diberikan, tentu semakin memperkuat adanya indikasi bahwa perjanjian parkir tersebut adalah perjanjian penitipan barang.

Petunjuk dapat ditemukan di beberapa lokasi parkir yang ada di Universitas Brawijaya, dengan adanya tanda parkir khusus untuk mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat memperkuat indikasi bahwa perparkiran yang ada di Universitas Brawijaya merupakan perjanjian penitipan barang.

- 2) Apakah ada pengawasan dalam gedung parkir? Semakin (terlihat) ketatnya pengawasan dalam parkir, akan membuat perjanjian parkir juga semakin mudah dianggap perjanjian penitipan.

Pengawasan dalam hal ini adalah adanya petugas parkir yang menjaga area parkir yang telah tersedia di Universitas Brawijaya. Dengan adanya pengawasan oleh petugas parkir, maka dapat dianggap perparkiran di Universitas Brawijaya adalah perjanjian penitipan.

Didalam Surat Edaran tentang parkir baik yang lama maupun yang baru, tidak dijelaskan bentuk perparkiran “seperti apa” yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya. Namun, jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Faure tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perparkiran di Universitas Brawijaya ini adalah penitipan barang.

Hal ini dipertegas lagi dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 3416.K/pdt/1985 yang isinya menyatakan bahwa perparkiran itu adalah merupakan perjanjian penitipan barang.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya.<sup>18</sup> Sebagai sebuah penitipan, pengelola tempat parkir sebagai

<sup>16</sup><http://nasima.wordpress.com/2012/08/13/masalah-perjanjian-parkir-2/>. Diakses tanggal 11 September 2013

<sup>17</sup> <http://myslawlibrary.wordpress.com/2013/05/13/parkir-sebagai-perjanjian-penitipan/>. Diakses tanggal 23 Februari 2014.

<sup>18</sup> Prof.R.Subekti, S.H., **Aneka Perjanjian**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.Hal.111

penerima penitipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan (kendaraan bermotor) dalam keadaan semula pada saat dititipkan.

Dengan demikian, maka petugas parkir harus bertanggung jawab secara penuh atas kendaraan bermotor dan segala benda yang menempel pada kendaraan bermotor tersebut apabila terjadi kehilangan di area parkir.

Dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang, pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor dapat melakukan upaya perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini dapat berbentuk Litigasi dan Non Litigasi.

#### **a. Upaya Non Litigasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat (10), bentuk penyelesaian sengketa ada 5 macam yaitu :

- 1) Konsultasi
- 2) Negoisasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi
- 5) Penilaian ahli

Dari 4 Korban kehilangan kendaraan bermotor yang peneliti wawancarai, terdapat 1 korban yang melakukan upaya non litigasi dengan cara negoisasi, yaitu Amalia Rachma Indriani.

Setelah Amalia tidak berhasil meminta ganti rugi kepada pihak Universitas Brawijaya, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah dengan meminta ganti kerugian kepada Petugas parkir yang sedang menjaga area parkir dimana kendaraan bermotor tersebut hilang dengan cara negoisasi.

Amalia kemudian kembali lagi menemui petugas parkir yang bersangkutan menjaga sepeda motor yang dititipkan kepadanya. Amalia melakukan negoisasi dengan petugas parkir yang bersangkutan yang berakhir dengan petugas tersebut masih tidak mau bertanggung jawab terhadap sepeda motor milik Amalia yang hilang.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Amalia Rachma Indriani, Mahasiswi FIA UB, pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB di rumah Amalia.

### **b. Upaya Litigasi**

Berdasarkan Wawancara peneliti dengan para korban kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang, dari 4 Korban kehilangan kendaraan bermotor, tidak ada satupun yang melakukan upaya penyelesaian sengketa di peradilan umum. Semua korban kehilangan kendaraan bermotor lebih memilih untuk melepas masalah tersebut tanpa adanya solusi yang memadai, daripada mempersulit keadaan yang ada. Upaya terakhir yang dilakukan Korban kehilangan kendaraan bermotor adalah dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek yang bersangkutan.

## **3. Upaya Pihak Universitas Brawijaya Untuk Melindungi Pengguna Jasa Parkir Yang Kehilangan Kendaraan Bermotor**

### **a. Upaya Represif**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, apabila pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya mengalami kehilangan kendaraan bermotornya, pihak Universitas Brawijaya hanya dapat melakukan upaya berupa ganti kerugian sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada Surat Edaran Rektor tentang Parkir.<sup>20</sup>

Adapun Syarat dan Ketentuan tersebut adalah :

- 1) Ada bukti karcis masuk
- 2) Kendaraan di parkir yang ada petugas parkir
- 3) Kendaraan hilang pada saat jam parkir dan ada petugas parkir
- 4) Kendaraan betul-betul dalam keadaan terkunci dengan menunjukkan bukti kunci, STNK dan BPKB asli
- 5) Penggantian kendaraan yang hilang/rusak :

Bagi kendaraan yang hilang akan diganti oleh UB sebesar 50% dari harga taksiran pada saat kehilangan (harga taksiran dilampiri bukti surat keterangan dari showroom jual beli kendaraan).

Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor disebabkan karena kelalaian petugas parkir yang bersangkutan, pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya juga dapat bertanggung jawab atas ganti kerugian yang disebabkan oleh petugas parkir yang bersangkutan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang tertera pada Surat Edaran Rektor tentang Parkir.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Muhamad Reza Aditya Warman, Kordinator Petugas Parkir Universitas Brawijaya. Hari Senin, 24 Februari 2014.

Hal ini sesuai dengan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.<sup>21</sup>

Penjelasan dari pasal 1367 ini adalah seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Ketika seorang petugas parkir dalam menjaga area parkir melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi para pengguna jasa parkir, tidak hanya petugas parkir itu saja yang dapat bertanggungjawab tetapi juga “majikan” dari para petugas parkir ini juga ikut bertanggungjawab mengganti kerugian, yang dalam hal ini adalah pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya Malang.

#### **b. Upaya Preventif**

Dalam hal ini, bentuk tanggung jawab dari pihak Universitas Brawijaya selaku majikan dari petugas parkir tidak hanya sebatas mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jasa saja, melainkan juga bagaimana pihak Universitas Brawijaya mencegah supaya pengguna jasa parkir tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kordinator petugas parkir Universitas Brawijaya, tidak disebutkan adanya upaya preventif atau pencegahan supaya pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya tidak mengalami kehilangan kendaraan bermotor lagi.

Menurut analisis peneliti, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan pihak Universitas Brawijaya untuk mencegah terjadinya kehilangan kendaraan bermotor dan melindungi pengguna jasa parkir itu sendiri.

- 1) Pembaruan karcis tanda masuk dan karcis penitipan kendaraan bermotor.

Pada ketentuan karcis tanda masuk, dalam Surat Edaran Rektor Nomor 5798/UN10.16/LL/2010 tidak menjelaskan secara detail syarat dan ketentuan bagi pengguna jasa parkir seperti yang tertera pada Surat Edaran Rektor tentang Parkir, begitu juga sama halnya dengan Surat Edaran Rektor Nomor 5088/UN 10/LL/2013.

---

<sup>21</sup>Pasal 1367 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Hal ini menyebabkan dirasa bagi para pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya, karcis tanda masuk tidaklah penting. Padahal karcis tanda masuk sangatlah penting apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor, pihak Universitas Brawijaya juga dapat memberikan upaya perlindungan hukum berupa ganti kerugian. Jika pengguna jasa parkir tidak memiliki karcis tanda masuk, maka pihak Universitas Brawijaya tidak dapat memberikan upaya ganti kerugian.

Selain itu, dengan hanya karcis tanda masuk saja, masih belum memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya karena tidak semua orang yang masuk Universitas Akan memarkir kendaraannya di area parkir, hanya pengguna jasa parkir yang memiliki kepentingan saja yang menggunakan area parkir. Dalam hal ini diperlukan adanya karcis bukti penitipan kendaraan bermotor yang sedang diparkir guna sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor tersebut benar-benar diparkir pada area parkir Universitas Brawijaya.

Dari perbandingan surat edaran rektor lama dan baru, tidak terdapat pembaruan karcis tanda masuk kampus Universitas Brawijaya. Pada karcis tanda masuk Universitas Brawijaya baik sebelum maupun sesudah adanya Surat Edaran Rektor tentang Parkir yang baru, karcis tanda masuk kampus hanya berisi tanggal, nomor kendaraan, nomor seri karcis, nama jenis pungutan dan peringatan yang menyatakan untuk mengunci ganda kendaraan bermotor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 1999, karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.<sup>22</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 1999, pencetakan karcis parkir harus memenuhi standar teknis pengamanan.<sup>23</sup> Karcis parkir terdiri dari dua bagian, yaitu :<sup>24</sup>

- a) Bagian pertama yang merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
- b) Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai petinggal (struk).

Pada karcis parkir harus memuat ketentuan data sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 1999 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah**.

<sup>23</sup>Pasal 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 1999 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah**.

<sup>24</sup>Pasal 11 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 1999 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah**.



- a) Nomor seri.
- b) Nama jenis pungutan.
- c) Dasar hukum pungutan.
- d) Nomor urut karcis parkir.
- e) Besarnya retribusi.
- f) Waktu masuk dan keluar kendaraan.
- g) Nomor polisi kendaraan.

## 2) Penggantian Kendaraan yang Hilang/Rusak :

Bagi kendaraan yang hilang akan diganti oleh UB sebesar 50% dari harga taksiran pada saat kehilangan (harga taksiran dilampiri bukti surat keterangan dari showroom jual beli kendaraan).

Universitas Brawijaya sebagai pihak penyedia jasa layanan parkir, tentunya harus memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir, terlebih jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan kendaraan bermotor yang dialami oleh pengguna jasa parkir.

Dalam hal ganti kerugian, pihak Universitas Brawijaya hanya mengganti kerugian sebesar 50% dari harga taksiran showroom.<sup>25</sup>

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pihak Universitas Brawijaya harus mengganti kerugian yang diderita korban kehilangan kendaraan bermotor yang sejenis barangnya atau setara nilainya dengan kendaraan bermotor yang hilang.

## 3) Memperjelas peran dari petugas parkir

Didalam Surat Edaran Rektor tentang Parkir Nomor 5798/UN10.16/LL/2010 dan Nomor 5088/UN 10/LL/2013, tidak terdapat ketentuan tentang bentuk kewajiban secara rinci petugas parkir. Kewajiban utama petugas parkir adalah menjaga

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Muhamad Reza Aditya Warman, Kordinator Petugas Parkir Universitas Brawijaya. Hari Senin, 24 Februari 2014.

kendaraan bermotor milik pengguna jasa yang sedang diparkir di area parkir. Tidak terdapat rincian bentuk kewajiban seperti mengecek dan mengamankan barang-barang yang tertinggal di kendaraan bermotor (misalnya kunci motor).

Setiap lokasi parkir terdapat 2 hingga 3 petugas parkir yang bertugas menjaga dan mengatur kendaraan bermotor yang sedang diparkir. Perbandingan antara petugas yang menjaga dengan kendaraan yang dijaga terlalu besar. Hal inilah yang menyebabkan kelalaian petugas parkir dalam menjaga area parkir dan mengakibatkan terjadinya kehilangan kendaraan bermotor.

#### **D. Kesimpulan Dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Berdasarkan teori *liability based on fault*, petugas parkir harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian padanya yang menyebabkan kehilangan kendaraan bermotor milik pengguna jasa parkir. Hal ini telah sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: 1) adanya perbuatan melanggar hukum, 2). adanya kesalahan, 3). adanya kerugian, 4). adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian tersebut.
- b. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang adalah masih belum mendapatkan perlindungan hukum, karena masih banyak pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotornya tidak mendapatkan ganti rugi.
- c. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya untuk melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan ganti rugi kepada pihak yang kehilangan dengan syarat dan ketentuan yang tertera pada Surat Edaran parkir tersebut terpenuhi.

##### **2. Saran**

- a. Bagi universitas Brawijaya terkait peraturan parkir, dikarenakan masih banyaknya pengguna jasa parkir yang tidak tahu mengenai peraturan parkir yang ada, diharapkan pihak Universitas Brawijaya melakukan :
  - 1) Memperjelas izin dan peraturan pengelolaan parkir yang ada di Universitas Brawijaya dengan menyesuaikan Perda Malang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

- 2) Memperjelas bentuk perparkiran di Universitas Brawijaya menjadi Penitipan Barang supaya lebih menjamin kepastian hukum.
- b. Bagi pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya Malang, terkait peraturan parkir, diharapkan pengguna jasa parkir supaya :
  - 1) Mematuhi peraturan yang tertera pada Surat Edaran Rektor tentang Parkir
  - 2) Mintalah karcis tanda masuk ke petugas portir
  - 3) Amankan kendaraan bermotor masing-masing dengan memberikan kunci ganda pada kendaraan bermotor
- c. Bagi penegak hukum khususnya Kepolisian, terkait dengan adanya kasus kehilangan kendaraan bermotor khususnya di Universitas Brawijaya Malang, diharapkan pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan dan keamanan di area parkir Universitas Brawijaya dan Sekitarnya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Data Buku**

Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Prof.R.Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

### **Data Perundang-Undangan**

Perda Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Pengelolaan Tempat Parkir**.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 73 Tahun 1999 tentang **Pedoman Penyelenggaraan Parkir di Daerah**.

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

### **Data Wawancara**

Wawancara dengan Amalia Rachma Indriani, Mahasiswi FIA UB, pada Tanggal 19 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB di Rumah Korban.

Wawancara dengan Muhamad Reza Aditya Warman, Kordinator Petugas Parkir Universitas Brawijaya. Hari Senin, 24 Februari 2014.

Wawancara dengan Mohammad Charis Ismail, Mahasiswa FH UB, pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 14.00 di lantai 3 gedung B FH UB

Wawancara dengan Zeta Alvema Novita Sari, Mahasiswi FIA UB, pada tanggal 20 November 2013 pukul 14.00 WIB di Kantin FIA UB

Wawancara dengan Ersu Ratna Sari, Mahasiswi FEB UB, pada tanggal 20 November 2013 pukul 13.00 WIB di Kantin FEB UB

### **Data Internet**

<http://nasima.wordpress.com/2012/08/13/masalah-perjanjian-parkir-2/>. Diakses tanggal 11 September 2013.

<http://prasetya.ub.ac.id/berita/UB-Terima-15419-Mahasiswa-Baru-Tertinggi-di-Indonesia-11102-id.html>. Diakses 2 Maret 2014.

<http://myslawlibrary.wordpress.com/2013/05/13/parkir-sebagai-perjanjian-penitipan/>. Diakses tanggal 23 Februari 2014.